

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mobilitas sosial berperan sebagai tolok ukur penting untuk melihat kemampuan masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan melalui perubahan posisi sosial maupun ekonomi. Upaya mendorong mobilitas sosial menjadi aspek kunci dalam pembangunan yang berorientasi pada inklusivitas di Indonesia. Tujuannya adalah memperkecil ketimpangan serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks negara berkembang, dinamika kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas kewirausahaan yang berkontribusi dalam membuka peluang kerja dan mengurangi kemiskinan (Hidayat dkk., 2021). Namun demikian, dalam realitas ketenagakerjaan, khususnya pada sektor informal, faktor ketersediaan pilihan kerja dan akses kerja tetap menjadi aspek yang lebih langsung memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa mobilitas sosial masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, terutama di daerah dengan dominasi sektor informal dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal serta pelatihan kerja. Indonesia menempati posisi ke-67 dari total 82 negara dalam indeks mobilitas sosial dengan skor sebesar 49,3, menempatkannya di urutan ke-16 terbawah. Posisi Indonesia di kawasan ASEAN hanya berada di atas Laos, sedangkan peringkat tertinggi diraih oleh Singapura (World Economic Forum, 2020).

Menurut Habab dkk (2024) bahwa kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah dan akses kerja terbatas memiliki peluang mobilitas yang jauh lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Pekerja yang mengurus rumah tangga, buruh yang menggarap lahan pertanian, serta masyarakat yang menggantungkan hidup pada berbagai aktivitas di sektor informal kerap menghadapi situasi kerja yang rawan, di mana mereka memperoleh sedikit atau bahkan tidak mendapatkan jaminan kerja maupun tunjangan. Sebagian besar dari mereka juga tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun program peningkatan kemampuan kerja (Sibagariang dkk., 2023).

Aspek mendasar yang perlu diperhatikan dalam konteks ketenagakerjaan adalah perbedaan antara pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal adalah pekerja yang bekerja dalam sistem kerja yang diatur secara legal oleh pemerintah atau lembaga formal, menerima upah tetap, dan biasanya memperoleh jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan ketenagakerjaan. Adapun pekerja informal adalah mereka yang bekerja tanpa perjanjian kerja resmi, tidak tercatat dalam data ketenagakerjaan formal, dan tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial atau fasilitas kerja yang memadai, contohnya meliputi pedagang kaki lima, pekerja serabutan, pembantu rumah tangga, hingga buruh tani (Yeni & Rafifah, 2024).

Fenomena kerentanan pekerja informal ini tercermin di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data kependudukan resmi Kabupaten Tanah Laut, jumlah tenaga kerja terdaftar di Kecamatan Bati-Bati adalah 3.768 orang pada tahun 2021. Sementara

itu, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) di kecamatan tersebut mencapai 31.120 jiwa pada tahun yang sama. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia produktif di Bati-Bati bekerja secara informal atau tidak terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan formal maupun belum memiliki pekerjaan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Pekerja Terdaftar**

Tahun	Jumlah
2019	201
2020	157
2021	3.768

*Sumber: Satu Data Tanah Laut (Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar)*

Kondisi ketenagakerjaan di Kecamatan Bati-Bati menunjukkan dinamika yang menarik dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah tenaga kerja terdaftar pada tahun 2019 tercatat sebanyak 201 orang dan meningkat signifikan pada tahun 2021 3.768 orang. Kenaikan ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun, angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bati-Bati berdasarkan kelompok umur 15-64 tahun yang berjumlah 31.120, artinya hanya sedikit penduduk Bati-Bati yang berstatus sebagai tenaga kerja terdaftar, sedangkan sebahagian besar masyarakat Bati-Bati merupakan pekerja tidak terdaftar, yang sebagian besar dapat dikategorikan sebagai pekerja informal maupun mereka yang masih belum mendapatkan pekerjaan.

Salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat pengangguran terbuka

(TPT) di Kecamatan Bati-Bati relatif rendah jika dibandingkan dengan angka nasional yang pada tahun 2021 mencapai 3,52% (Badan Pusat Statistik, 2021). Rendahnya angka pengangguran ini tidak serta merta mencerminkan tingginya kualitas ketenagakerjaan, sebab mayoritas penduduk yang bekerja berada di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap dan tanpa perlindungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama ketenagakerjaan di Bati-Bati bukan hanya pada jumlah pengangguran, melainkan pada dominasi pekerjaan berstatus informal yang berdampak langsung terhadap keterbatasan mobilitas sosial masyarakat, data tersebut bisa di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2 TPT Kecamatan Bati-Bati**

<b>Tingkat Pengangguran Terbuka Kecamatan Bati-Bati</b>			
Tahun	2020	2021	2022
Persen	3,57%	3.52%	4,17%

*Sumber: (Baihaqi, 2023)*

Kondisi ini menarik karena Kecamatan Bati-Bati memiliki konsentrasi industri yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini terlihat dari keberadaan sejumlah pabrik pengolahan kayu, industri makanan, serta pabrik kelapa sawit dan karet. Keberadaan banyaknya pabrik industri di Bati-Bati tidak terlepas dari posisinya yang strategis secara geografis, yakni berada di antara jalur utama penghubung Banjarmasin, Banjarbaru dan Pelaihari, kedekatan dengan pelabuhan dan pasar regional, serta tersedianya lahan luas dengan biaya operasional yang relatif rendah. Menurut kajian Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan (2022), Bati-Bati dipilih sebagai lokasi industri

karena memiliki akses transportasi darat yang baik, ketersediaan bahan baku lokal, serta dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan air yang relatif memadai.

Keberadaan industri tersebut tidak serta merta mengangkat status sosial dan ekonomi mayoritas penduduk. Banyak penduduk sekitar yang hanya mengisi posisi sebagai pekerja tidak tetap, pekerja kasar, atau pekerja harian lepas yang tidak mendapatkan kontrak kerja formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi industrialisasi, sebagian besar penduduk tetap terjebak dalam sektor informal karena keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan informasi kerja yang memadai.

Adapun permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor struktural dan sosial. Meskipun secara umum laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini tergolong sedang, yaitu sebesar 1,26% (Badan Pusat Statistik, 2023), peningkatan jumlah pekerja informal menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk produktif berjalan cukup cepat. Dalam konteks ini, kemampuan individu untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pekerjaan, tetapi juga oleh kepemilikan dan akses terhadap sumber daya yang mendukung aktivitas ekonomi. Modal produktif mencakup modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal keuangan yang berperan dalam memengaruhi kesejahteraan rumah tangga serta keberlanjutan kehidupan melalui pendapatan atau upah individu (Al-afeef, 2017). Keterbatasan terhadap berbagai jenis modal tersebut menyebabkan sebagian besar pekerja informal sulit meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, sehingga berdampak pada rendahnya peluang mobilitas sosial.

Pilihan kerja yang diambil oleh masyarakat Bati-Bati umumnya bukan didasarkan pada preferensi pribadi semata, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan informasi pasar kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Kriyanto dan Kaluge (2018), kelompok masyarakat dengan keterbatasan modal sosial dan ekonomi cenderung terjebak dalam pekerjaan berupah rendah dan tidak berkelanjutan, yang pada akhirnya menghambat mobilitas sosial mereka. Situasi di Kecamatan Bati-Bati berpotensi memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak ditangani secara komprehensif melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

Akses kerja yang mencakup akses fisik ke lokasi kerja, akses informasi, serta akses terhadap pelatihan dan koneksi sosial dalam praktiknya memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan mobilitas ekonomi dan sosial. Individu dengan akses lebih luas cenderung memperoleh kesempatan lebih besar dalam memilih pekerjaan yang lebih stabil dan menjanjikan (Habab dkk., 2024). Dalam Islam, perubahan kondisi hidup menjadi lebih baik juga merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diupayakan. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Ra'ad: 11:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11)*

Ayat ini memperlihatkan pentingnya ikhtiar aktif dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi, termasuk dalam menciptakan akses kerja yang adil dan merata.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa 87,9% masyarakat di Kecamatan Bati-Bati belum berstatus sebagai tenaga kerja terdaftar, yang mengindikasikan keterlibatan sebagian besar dari mereka dalam sektor informal. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatiannya pada pekerja informal, yang menghadapi tantangan struktural dalam mengakses pekerjaan layak dan mobilitas sosial. Kondisi ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi jika tidak ditangani dengan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berbasis data.

Peningkatan kualitas hidup melalui kerja keras dan ilmu pengetahuan, dalam konteks Islam, merupakan bagian dari cita-cita sosial yang luhur. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Mujadalah: 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *"Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujadalah: 11)*

Ayat ini memberikan landasan spiritual bahwa peningkatan derajat sosial, termasuk mobilitas sosial, sangat terkait dengan keimanan dan pengetahuan, yang keduanya bisa diperoleh melalui pendidikan dan pekerjaan yang baik.

Saat ini, kajian yang dilakukan secara simultan masih tergolong minim menganalisis pengaruh pilihan kerja dan akses kerja terhadap mobilitas sosial pekerja informal di tingkat kecamatan, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah empiris tersebut serta memberikan dasar bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan lokal yang lebih inklusif dan berbasis data. Melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi

berganda, penelitian ini akan menguji secara statistik sejauh mana **pilihan kerja dan akses kerja memengaruhi mobilitas sosial pekerja informal di Kecamatan Bati-Bati.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pilihan kerja dan akses berpengaruh secara parsial terhadap mobilitas sosial pekerja informal di kecamatan Bati-Bati?
2. Apakah pilihan kerja dan akses berpengaruh secara simultan terhadap mobilitas sosial pekerja informal di kecamatan Bati-Bati?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis apakah pilihan kerja dan akses berpengaruh secara parsial terhadap mobilitas sosial pekerja informal di kecamatan Bati-Bati.
2. Menganalisis apakah pilihan kerja dan akses berpengaruh secara simultan terhadap mobilitas sosial pekerja informal di kecamatan Bati-Bati.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki nilai signifikan baik dalam ranah akademik maupun praktis:

1. Signifikansi Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur yang membahas hubungan antara pilihan kerja, akses terhadap sumber daya, dan mobilitas sosial, khususnya dalam konteks pekerja informal di wilayah non-perkotaan. Dengan memfokuskan studi di Kecamatan Bati-Bati, penelitian ini menjawab kesenjangan kajian yang selama ini lebih terpusat pada konteks urban atau kawasan industri besar. Studi ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis tentang faktor-faktor struktural dan

individual yang memengaruhi mobilitas sosial pekerja informal, serta memperluas cakupan kajian sosiologi kerja dan pembangunan sosial.

## 2. Signifikansi Secara Praktis

Hasil penelitian ini memiliki relevansi langsung bagi pembuat kebijakan, lembaga pelatihan kerja, dan pelaku sektor ketenagakerjaan dalam merumuskan program pemberdayaan pekerja informal yang lebih kontekstual. Dengan memahami dinamika pilihan kerja dan hambatan akses terhadap mobilitas sosial, pihak terkait dapat:

- a. Menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pekerja informal.
- b. Mengembangkan program pelatihan atau pendidikan vokasional selaras dengan kondisi dan potensi wilayah setempat.
- c. Meningkatkan dukungan terhadap akses informasi, modal sosial, dan peluang kerja yang lebih berkelanjutan.

## 3. Signifikansi Sosial

Penelitian ini memberi wawasan tentang bagaimana struktur sosial dan akses peluang memengaruhi mobilitas sosial pekerja informal. Hal ini penting untuk mendorong kesetaraan kesempatan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu sosial, tetapi juga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adil dan efektif bagi pekerja informal di daerah.